

## **AS Mundur, Aturan Main Gasifikasi Batu Bara Perlu Dikaji Lagi**

Jakarta, CNBC Indonesia - Air Products and Chemicals Inc. yang merupakan perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat (AS) memilih tidak lagi melanjutkan kembali dua proyek gasifikasi batu bara di Indonesia. Keduanya yakni terkait proyek DME sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero), serta proyek gasifikasi batu bara menjadi etanol dengan perusahaan Group Bakrie, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menilai, memang regulasi menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah Indonesia. Dia mengatakan konsistensi dari regulasi menjadi pertimbangan bagi Investor proyek gasifikasi batu bara di Indonesia. Hendra menilai regulasi yang ada saat ini perlu dikaji lebih lanjut dan mempertimbangkan substansi yang perlu ditingkatkan untuk menarik investor masuk pada proyek hilirisasi batu bara di Indonesia. "Ini konsistensi pemerintah mengeluarkan aturan perundang-undangan ini apresiasi. Ini forward looking pemerintah jamin aturan ini tetap konsisten umur project kita kaji lebih lanjut kita tinggal mana yang kurang dan perlu ditingkatkan," ungkap Hendra kepada CNBC Indonesia dalam program 'Mining Zone', dikutip Senin (13/3/2023). Selain itu, Hendra mengungkapkan bahwa perusahaan yang sudah menggelontorkan dana yang terbilang tidak kecil menjadi 'point of no return' artinya tidak ada langkah mundur dari proyek gasifikasi batu bara di Indonesia. "Saya kira semangat sudah tepat perusahaan-perusahaan yang pegang PKP2B mengajukan rencana proyek gasifikasi, mereka gelontorkan dana yang tidak kecil, point of no return, apa yang dibutuhkan oleh pemerintah bagaimana harga jual offtaker yang harus diolah," tambahnya. Sebelumnya, Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Idris Sihite mengatakan keluarnya Air Products di dua kerja sama proyek gasifikasi batu bara tidak akan berdampak pada rencana hilirisasi tambang di dalam negeri. Mengingat, kewajiban hilirisasi sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), terutama bagi PKP2B yang kontraknya telah mendapatkan perpanjangan menjadi IUPK. "Antara PTBA dan Air Products itu

skema bisnis yang mungkin belum ketemu aspek keekonomian dan sebagainya walaupun di dalamnya ada rencana untuk substitusi ketergantungan impor LPG tapi untuk hilirisasi mau Air Products dan produk-produk lain harus tetap menjalankan hilirisasi," kata dia di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Jumat (10/3/2023). Menurut Idris pemerintah juga telah mengumpulkan beberapa perusahaan-perusahaan batu bara yang mempunyai kewajiban hilirisasi. Terutama untuk mengingatkan agar komitmen mereka dalam menjalankan hilirisasi di dalam negeri tidak kendor. "Kemarin lusa kita sudah kumpulkan perusahaan perusahaan batu bara yang memiliki kewajiban hilirisasi itu dan menagih komitmennya karena perpanjangan itu mensyaratkan program hilirisasi itu," kata dia. Di samping itu, Idris juga mengungkapkan terdapat investor asal China yang mulai berminat masuk dalam investasi gasifikasi batu bara di Indonesia. Terutama setelah Air Products berencana untuk tidak melanjutkan kembali proyeknya. Meski demikian, Idris tidak membeberkan secara pasti siapa perusahaan asal China yang tertarik untuk menggantikan investasi Air Products di Indonesia. Hanya saja beberapa investor asal China itu bakal masuk pada sejumlah proyek hilirisasi batu bara, termasuk gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). "Oh banyak, bukan hanya ke PTBA tapi ke KPC dan lain sebagainya secara natural saja kan tercipta supply and demand pasti itu," kata dia. Perlu diketahui, proyek DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan ini mulanya ditargetkan bisa menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun dan diperkirakan menyerap 6 juta ton batu bara per tahunnya. Dengan produksi 1,4 juta ton DME per tahun, maka diperkirakan bisa menekan impor LPG sebesar 1 juta ton per tahunnya. Proyek yang disaksikan langsung awal pembangunannya atau ground breaking oleh Presiden Jokowi pada 24 Januari 2022 ini bernilai investasi US\$ 2,1 miliar dan bisa menghemat devisa pengadaan impor LPG hingga Rp 9,14 triliun per tahun.